



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota Lhokseumawe Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyelesaian LKjIP ini juga tidak terlepas dari partisipasi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan implementasi dari Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Peraturan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LKj IP disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governence* Kota Lhokseumawe yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Instansi Pemerintah. Materi LKj IP mengandung analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang bersangkutan. Selain dari itu LKj IP berfungsi sebagai sarana bagi Pemerintah Kota untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* dan masyarakat dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dirasakan masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga perlu mendapat saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Kiranya LKj IP ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota dan pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai sarana untuk meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada masa yang akan datang.

Lhokseumawe, Maret 2019

WALIKOTA LHOKSEUMAWE



SUAIDI YAHYA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Geografis.....	2
1.2 Tinjauan Ekonomi.....	4
1.3 Analisis Isu-Isu Strategis.....	8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	15
1.5 Sistematika Penyajian.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategik Pemerintah Kota Lhokseumawe.....	21
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2018.....	48
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	59
3.1 Capaian Kinerja.....	59
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	69
3.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capain Kinerja..	79
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	83
BAB IV PENUTUP.....	89

LAMPIRAN

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| Lampiran 1 | RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 |
| Lampiran 2 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 |
| Lampiran 3 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 |
| Lampiran 4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2018 |
| Lampiran 5 | Pengukuran Kinerja Tahun 2018 |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Lhokseumawe menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang memuat capaian atas indikator kinerja sasaran strategis untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Visi Pemerintah Kota Lhokseumawe :

"Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyari'at, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki"

Melalui penetapan visi tersebut diharapkan terwujudnya perubahan yang fundamental dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe serta pemerintahan yang menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga pada tahun 2018 Kota Lhokseumawe akan tumbuh menjadi Kota yang makmur dan beradab, sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Memperkuat Pelaksanaan Syari'at Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat;

2. Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and Good Governace*);
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai;
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari;
7. Mewujudkan ketentaraman, ketertiban, kedamaian dan persatuan.

Penjabaran/implementasi Misi tersebut di atas diarahkan pada pencapaian tujuan lima tahunan. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 9 (sembilan) tujuan yang akan diwujudkan atau dihasilkan secara bertahap melalui penetapan program-program prioritas pembangunan.

Kondisi lima tahunan sebagaimana tergambar dalam rumusan tujuan, akan diupayakan perwujudannya secara bertahap dalam sasaran tahunan. Untuk Tahun 2018, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran yang disertai dengan penetapan 157 Program.

Dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja untuk 11 (sebelas) sasaran yang telah diperjanjikan, sebanyak 12 indikator mencapai nilai > 85% dengan kategori “sangat baik”, dan sebanyak 1 indikator yang mencapai nilai < 55% dengan kategori “kurang”

Berikut rincian pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN HASIL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Penduduk di bawah garis Kemiskinan	Persen	9,5	11,81	76%
2.	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2134	2840	133%
3.	Jumlah investor	PMDN/ PMA	320	388	121%
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	15,28	15,17	99%
5.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,05	71,14	100%
6.	Kategori Hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	CC	100%
7.	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	100%
8.	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	100%
9.	Penanganan Kawasan Kumuh	Persen	76,4	66,7	87%
10.	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	62,2	26,23	42%
11.	Luasan RTH Publik 20%	Persen	27,9	30,9	111%
12.	Persentase sampah yang tertangani	Persen	74,97	81,53	91%
13.	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	69	47	116%

Capaian kinerja Tahun 2018 umumnya lebih baik dari Tahun 2017. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan diantaranya penguatan Sistem AKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 dihadapkan pada kendala dan keterbatasan sebagai berikut :

- a. Terlambatnya pengiriman data dari OPD;
- b. Belum tepatnya data yang diterima dari Laporan Kinerja OPD;
- c. Keterbatasan kemampuan perangkat daerah dalam merumuskan indikator kinerja serta target kinerja yang benar-benar memenuhi kriteria *SMART*;
- d. Keterbatasan SDM Aparatur untuk menganalisis hasil capaian kinerja karena belum maksimalnya data dari OPD.

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKj IP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai media informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dan umpan balik peningkatan kinerja dimasa mendatang menuju pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.



BAB I **PENDAHULUAN**

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa kepada publik disebut *governance* (kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas manajerial* pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe selama Tahun 2018, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018.

Kota Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dengan Ibukota Lhokseumawe. Berikut ini diuraikan gambaran umum Kota Lhokseumawe meliputi kondisi geografis, potensi ekonomi, sumber daya manusia, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan LKj IP, dan sistematika penyajian LKj IP.

1.1 KONDISI GEOGRAFIS

Letak geografis Kota Lhokseumawe antara $04^{\circ} - 54^{\circ}$ Lintang Utara dan Lintang $05^{\circ} - 18^{\circ}$ Selatan serta $96^{\circ} - 20^{\circ}$ dan $97^{\circ} - 21^{\circ}$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 13 meter, dengan luas wilayah $181,06 \text{ km}^2$. Dilihat dari letaknya, Kota Lhokseumawe Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur), Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara), dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu). Dengan kedudukan ini, Kota Lhokseumawe berjarak kira-kira 275 Km dan dapat ditempuh selama 6 jam dengan perjalanan darat dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh). Adapun wilayah administrasi Kota Lhokseumawe meliputi 4 (empat) kecamatan, 9 (sembilan) kemukiman, dan 68 (enam puluh delapan) desa/gampong serta 259 dusun, Luas dan persentase untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Lhokseumawe

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	2	3	4
3	Muara Dua	57,80	31,92
2.	Blang Mangat	56,12	31,00
3.	Banda Sakti	11,24	6,21
4.	Muara Satu	55,90	30,87
JUMLAH		181,06	100,00

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2018

Dari luas wilayah tersebut penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Jenis Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan di Lhokseumawe

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1.	Lahan Pemukiman	10.877	60
2.	Industri Pabrik	894	5
3.	Persawahan	3.747	21
4.	Pertanian Lahan Semusim	308	2
5.	Perkebunan rakyat	749	4
6.	Alang-alang	191	1
7.	Hutan Belukar	587	3
8.	Perairan Darat	626	3
9.	Lain-lain	127	1
JUMLAH		18.106	100

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2018

1.2 TINJAUAN EKONOMI

1.2.1 Nilai PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh pada suatu daerah. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, aktivitas ekonomi juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan peningkatan pula pada nilai PDRB ADHB secara kontinu dari tahun ke tahun.

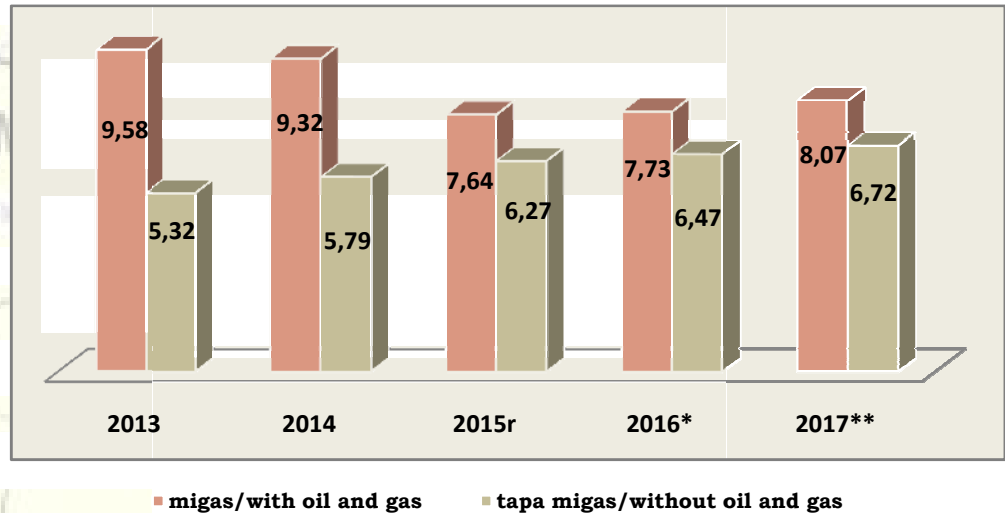
PDRB Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Dari tahun 2013, PDRB menurun sebesar 1,51 triliun rupiah menjadi 8,07 triliun rupiah pada tahun 2017.

Berbeda dengan PDRB menghitung migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,035 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2017 mencapai 6,72 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,25 triliun rupiah dari tahun 2016. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2013-2016 mengalami peningkatan dari 5,32 menjadi 6,47 triliun rupiah.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PRB atas dasar harga Konstan (ADHK) dengan dasar 2010.

Gambar PDRB ADHB Lhokseumawe, 2013-2017 (triliun rupiah)

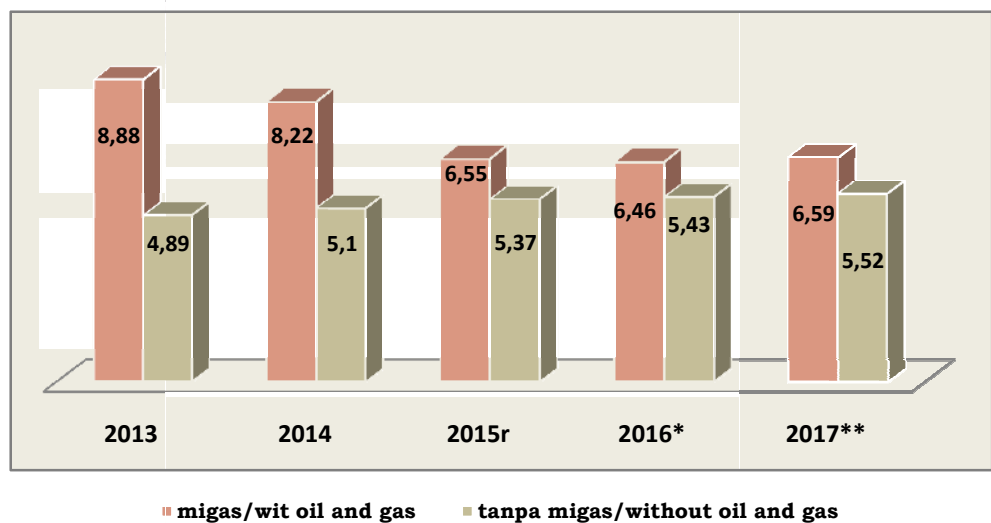
*Figure Lhokseumawe GRDP at Current Markes Prices, 2013-2017
(trillion rupiahs)*



Nilai PDRB ADHK Lhokseumawe pada tahun 2017 mencapai 6,59 triliun rupiah, menurun sebesar 2,28 triliun rupiah dari tahun 2013. PDRH ADHK tanpa migas pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 0,63 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 5,52 triliun rupiah.

Gambar PDRB ADHB Lhokseumawe, 2013-2017 (triliun rupiah)

*Figure Lhokseumawe GRDP at 2010 Current Markes Prices, 2013-2017
(trillion rupiahs)*



Selama 5 tahun terakhir (2013-2017) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar dari pada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan daripada kenaikan karena faktor produktivitas.

1.2.2 Struktur Ekonomi

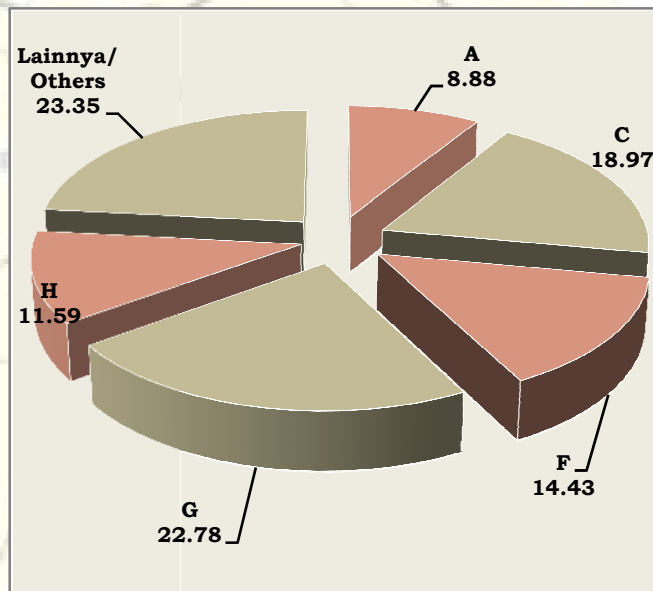
Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Sejak tahun 2015, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini meningkat dari 16,17 persen di tahun 2017.

Kategori dengan peranan kedua terbesar pada tahun 2017 adalah industri pengolahan sebesar 18,97 persen. Kategori ini mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 45,73 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 14,43 persen. Kategori ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 9,40 persen.

**Gambar Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
Dengan Migas Tahun 2017 (persen)**

*Figure Lhokseumawe Percentage Distribution Of GRDP at Current Market Prices
with
Oil and Gas, 2017 (Percent)*



Keterangan:

- A : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry, Fishery
- C : Industri Pengolahan / Manufacture Industry
- F : Konstruksi / Construction
- G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade; Repair Cars and Motorcycles
- H : Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storages
- Lainnya: Pertambangan Penggalian; Pengadaan Listrik, Air, Gas; Penyediaan Akomodasi Makan Minum; Infokom; Jasa Keuangan dan Real Estate; Administrasi Pemerintah; Kategori Lainnya / Mining and Quarrying; Electricity; Water and Gas Supply; and Communication and Food Service; Information and Communication; Financial Activities and Real Estate; Government Activities; Other Category.

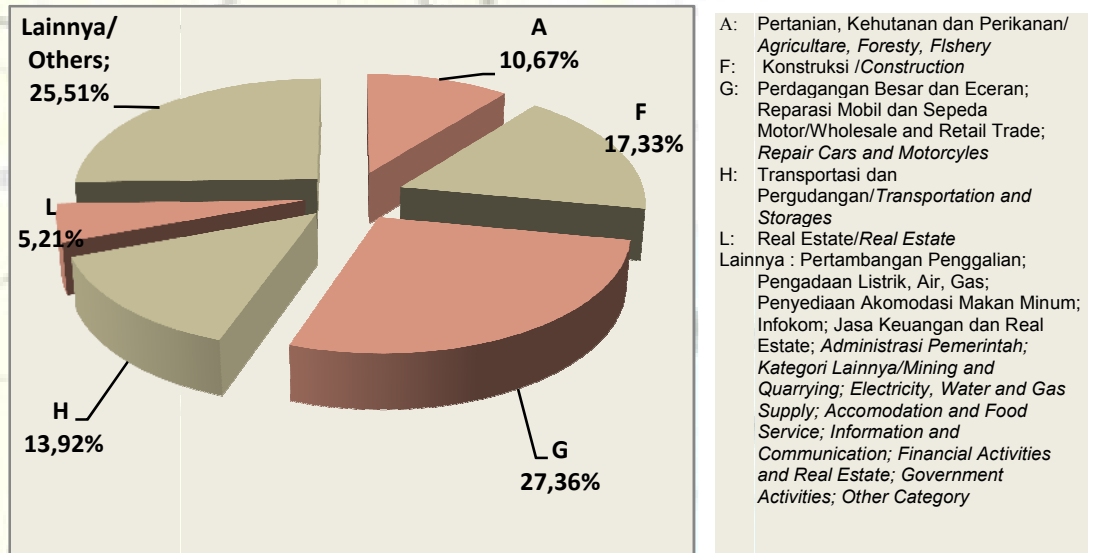
Kategori berikutnya yang cukup memberi kontribusi yaitu kategori Transportasi dan Pergudangan serta kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan kontribusi kategori Transportasi dan Pergudangan berada pada angka 11,59 persen dan kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,88 persen.

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihat bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul kategori konstruksi dan transportasi.

Di tahun 2017 dapat kita lihat bahwa kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi sumbangsih mencapai 27,36 persen, lalu kategori Konstruksi mencapai 13,92 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bahkan muncul dengan share sebesar 10,67 persen dan kategori real estate mencapai 5,21 persen.

**Gambar Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
Tanpa Migas, Tahun 2017 (persen)**

*Figure Lhokseumawe Percentage Distribution Of GRDP at Current Market Prices
without Oil and Gas, 2017(Percent)*



1.3 ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

Kota Lhokseumawe untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang akan menghadapi permasalahan dan tantangan, baik secara global, nasional maupun daerah. Dalam konteks kedaerahan terlihat bahwa hilangnya jati diri ureuëng Acèh (masyarakat Aceh) yang memiliki kepekaan sosial, nilai gotong royong serta musyawarah pada kehidupan sehari-hari, kemudian melemahnya ekonomi masyarakat dan karakter kemandirian serta pantang menyerah. Selain itu, pergeseran nilai karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa akibat lemahnya kepemimpinan yang seharusnya berperan sebagai pengayom masyarakat.

Secara makro, permasalahan Kota Lhokseumawe terlihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Menurut BPS jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah

garis kemiskinan) di Kota Lhokseumawe mencapai 23,2 ribu orang (11,98 %). Angka ini masih relatif tinggi walaupun cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dirasakan masih minim. Dalam hal keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe dirasakan belum mencapai proporsi yang diharapkan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi, sedangkan kebutuhan untuk belanja pegawai masih lumayan besar. Disamping itu, target pendapatan dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak mengalami penundaan transfer dari Pemerintah Pusat kedaerah sesuai Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 11 tahun 2016 tentang penundaan kiriman dana transfer kedaerah. Hal ini menghambat pembayaran (pencairan anggaran) pada beberapa kegiatan pada tahun 2016 dan menjadi kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk tahun anggaran 2017 dan 2018.

1.3.1 Permasalahan Pembangunan

A. Dinul Islam, Keistimewaan dan Sosial Budaya

- Tingginya kasus pelanggaran syariat islam dalam hal khalwat;
- Masih kurangnya eksplorasi cagar budaya;
- Tingginya pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Belum optimalnya pemberian bantuan terhadap operasional panti asuhan/jompo.

B. Ekonomi, Industri dan Pariwisata

- Perkembangan industri cenderung menurun seiring dengan habisnya produktivitas Kilang Arun;
- Menurunnya jumlah koperasi aktif;
- Daya serap tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan yang signifikan;

- Menurunnya produksi perikanan budidaya;
- Kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
- Belum tersedianya Gedung Perpustakaan Umum Daerah;
- Minimnya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.

D. Pelayanan Kesehatan

- Belum tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah;
- Rasio pelayanan Posyandu terhadap Balita belum memenuhi Standar;
- Masih tingginya kasus *pneumonia* pada bayi;
- Pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah;
- Belum optimalnya pemberian imunisasi campak pada balita;
- Masih ditemukan beberapa kasus seperti penderita TBC BTA(+), BPD dan Diare;

E. Penataan Birokrasi Pemerintah

- Belum tersedianya Gedung Arsip Daerah;
- Masih ada delapan SKPK yang belum memiliki gedung kantor;
- Penurunan opini tat kelola keuangan dari WTP menjadi WPD;
- Minimnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun pelatihan formal bagi ASN;
- Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;
- Masih adanya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.

F. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- Penanganan sanitasi masih belum optimal;
- Penanganan timbulnya sampah belum optimal
- Masih rendahnya akses air bersih kepada rumah tangga;
- Jumlah rambu-rambu lalu lintas belum memadai.

1.3.2 Isu-Isu Strategis

Perbedaan antara harapan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dengan kondisi saat ini (existing) merupakan gap yang dapat dijadikan isu strategis untuk program kerja lima tahun mendatang. Selain isu strategis daerah, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan isu daerah Aceh untuk lima tahun mendatang.

Isu Strategis Internasional meliputi:

- Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
- Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- Pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
- Sumber energi alternatif; dan
- Perubahan iklim global.

Selanjutnya isu Strategis Nasional yaitu:

- Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
- Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh, meliputi:

- Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia);
- Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan (Aceh Meuadab);
- Penguatan perdamaian secara berkelanjutan (Aceh Damee);
- Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (Aceh Troe);
- Pengembangan pertanian dan perikanan (Aceh Meugoe ngon Meulaot);
- Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (Aceh Kaya);
- Pengembangan pariwisata (Aceh Kaya);
- Ketenagakerjaan (Aceh Kreatif);
- Ketersediaan dan ketahanan energi (Aceh Energi);
- Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi (Aceh SIAT);
- Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (Aceh Seumeugot);
- Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni (Aceh Seuninya);
- Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan (Aceh Caroeng);
- Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Teuga);
- Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan (Aceh Seujahtra);
- Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Aceh Seujahtra);
- Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green).

Berdasarkan uraian atas Isu Strategis dan permasalahan pembangunan di atas, maka ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam.

Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam menjadi isu strategis dimana perilaku kehidupan sehari-hari individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, implementasi Qanun tentang pelaksanaan Dinul Islam harus dilaksanakan secara optimal. Kemudian pemahaman dan pengalaman agama dikalangan para pendidik juga perlu digalakkan sehingga dapat memberikan ilmu dan arahan pada generasi muda dalam menghadapi derasnya arus globalisasi.

2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata

Beberapa poin yang menjadi isu strategis dalam lingkup Ekonomi, Industri dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe meliputi:

- Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. Dengan adanya KEK ini diharapkan dapat menampung tenaga kerja untuk wilayah Kota Lhokseumawe.

- Pengembangan Industri.

Pengembangan industri di Kota Lhokseumawe difokuskan pada pengembangan industri jasa dan industri rumah tangga.

- Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikembangkan meliputi: Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, Pantai Meraksa, Bukit Goa Jepang, dan Waduk Jeulikat serta kawasan sekitaran waterboom di Kecamatan Blang Mangat.

- Pusat Pelayanan Skala Regional.

Berdasarkan letak geografis, Kota Lhokseumawe dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan perdagangan barang/jasa, pendidikan, kesehatan dengan skala regional yang meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas guru serta jumlah tenaga pendidik, kemudian pendistribusian guru secara merata pada setiap kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang terampil sehingga mampu bersaing di era globalisasi.

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Fokus dilakukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas tenaga kesehatan. Selain itu, Kota Lhokseumawe akan menaikkan status Puskesmas menjadi Rumah sakit tipe D sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

5. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan.

Fokus dilakukan pada pengambilan kebijakan guna memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menempatkan pimpinan SKPK sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian. Disamping itu, pemanfaatan anggaran yang lebih efisien serta melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan transparan dan akuntabel. Meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pendistribusian aparatur pemerintah yang proporsional guna pemberian pelayanan publik yang prima untuk memperoleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).

6. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan.

Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup masyarakat. Pada isu pemeliharaan

lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan dengan adanya dukungan serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah disusun guna mengantisipasi dampak lingkungan dari pembangunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

7. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif terus dilakukan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, menguatkan kembali nilai-nilai perdamaian (sustainable peace) guna menciptakan situasi aman tentram dalam kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN LKj IP 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus SAKIP Kota Lhokseumawe diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan Rencana Strategis Lima Tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

RPJPD Pemerintah Kota Lhokseumawe ditetapkan Qanun Nomor 4 Tahun 2014, sedangkan RPJMD Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2015. RPJMD mendefinisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis SKPD. Untuk menguraikan lebih detail perencanaan dalam RPJM, disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana kerja ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. SAKIP dibangun dan dikembangkan juga dalam rangka menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang kemudian dikomunikasikan kepada *stakeholder* Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bentuk LKj IP.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Lhokseumawe. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kota untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis pemerintah Kota dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

LKj IP memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai sarana evaluasi keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj IP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP oleh setiap instansi pemerintah

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj IP 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kota Lhokseumawe atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj IP 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Lhokseumawe bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kota Lhokseumawe dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Sistematika penyajian LKj IP Kota Lhokseumawe Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Geografis
- 1.2 Potensi Ekonomi
- 1.3 Analisis Isu – Isu Strategis
- 1.4 Maksud dan Tujuan LKj IP 2018
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategik Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2017-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk memetakan posisi Pemerintah Lhokseumawe.

Perencanaan Strategis Kota Lhokseumawe dituangkan ke dalam RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kerangka waktu jangka menengah selama lima tahun. RPJM disusun dengan memperhitungkan analisis lingkungan baik kekuatan daerah, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada maupun yang diprediksikan akan muncul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan *Qanun RPJMD Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014*. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, keberadaan RPJM Daerah Kota Lhokseumawe merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang seharusnya tertuang dalam *RPJP Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014* maupun RT/RW Kota Lhokseumawe. Dari keberadaannya akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD.

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 487 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Kemudian Penjabaran program dan kegiatan dituangkan ke dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Sesuai dengan sistematika terbaru penyusunan LKj IP Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka rencana strategis Kota Lhoskeumawe Tahun 2017-2022 di jabarkan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya akan ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran Tahun 2018.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIK PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Qanun RPJMD Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014 disusun dengan mengakomodir berbagai tuntutan *stakeholders* antara lain pengawasan yang profesional, pelayanan prima, perwujudan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, serta penerapan *good governance* dalam seluruh aspek asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pemerintahan. Untuk mendukung perencanaan strategik tersebut dapat dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe priode tahun 2017-2022 diantaranya:

1. Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam
2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
5. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan
6. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan
7. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 selanjutnya dapat

dilihat secara rinci pada Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dirumuskan dengan berorientasi masa depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, Visi kepala daerah terpilih harus dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah:



“TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARI’AT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MoU HELSINKI”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

Bersyari’at : Mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;

Sehat: Mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;

Cerdas: Mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;

Sejahtera: Mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spritual;

Berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki: adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapainya masyarakat Kota Lhokseumawe yang mandiri, makmur dan sejahtera.

MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Lhokseumawe yang akan dicapai tahun 2017-2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Memperkuat pelaksanaan Syari'at Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*);
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai;
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari;
7. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, kedamaian dan persatuan.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam waktu satu hingga lima tahun. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tujuan 1		Memperkuat Pelaksanaan Syari'at Islam	
Sasaran		Program	
1	Menguatnya Penegakan Syari'at dalam Bermasyarakat;	1.1.1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		1.1.2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		1.1.3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan Budaya
		1.1.4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
		1.1.5	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
		1.1.6	Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama
		1.1.7	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pemdidikan Agama
		1.1.8	Program Penelitian dan Pengembangan Agama
		1.1.9	Program Pengembangan Nilai Budaya
		1.1.10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		1.1.11	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
		1.1.12	Program Penguatan Lembaga Adat
		1.1.13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

		1.1.14	Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra
		1.1.15	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama
		1.1.16	Programa Penelitian dan Pengembangan Agama
		1.1.17	Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama
		1.1.18	Program Pembinaan Kegamaan dan Adat
		1.1.19	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan da Pembinaan Baitul Mal

Tujuan 2		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	
Sasaran		Program	
2.1	Menurunkan Angka Kemiskinan;	2.1.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (FMKS) Lainnya
		2.1.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		2.1.3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
		2.1.4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
		2.1.5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapida, PSK, Narkoba dan Sosial lainnya)
		2.1.6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		2.1.7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

	2.1.8	Program Peningkatan Peningkatan Kesempatan Kerja
	2.1.9	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketengakerjaan
	2.1.10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	2.1.11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	2.1.12	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	2.1.13	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
	2.1.14	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
	2.1.15	Program Peningkatan Kedaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan sumberdaya Laut
	2.1.16	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Masyarakat
	2.1.17	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	2.1.18	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	2.1.19	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
	2.1.20	Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan
	2.1.21	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
	2.1.22	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	2.1.23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

		2.1.24	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan/Perkebunan
		2.1.25	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
		2.1.26	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
		2.1.27	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
		2.1.28	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
		2.1.29	Program Peningkatan Produksi Peternakan
2.2	Meningkatkan Pertumbuhan UMKM;	2.2.1	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
		2.2.2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		2.2.3	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
		2.2.4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		2.2.5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		2.2.6	Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah
		2.2.7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		2.2.8	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
		2.2.9	Program Pengembangan Dagang dan Industri kecil Menengah
		2.2.10	Program Peningkatan Mutu Industri
2.3	Meningkatnya Iklim Investasi;	2.3.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

		2.3.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
		2.3.3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
		2.3.4	Program Peningkatkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.4	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata.	2.4.1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		2.4.2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		2.4.3	Program Pengembangan Kemitraan

Tujuan 3		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Semua Jenjang	
Sasaran		Program	
3.1	Meningkatnya Pendidikan Dasar yang Berkualitas;	3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		3.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		3.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		3.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		3.1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		3.1.6	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja
		3.1.7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		3.1.8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		3.1.9	Program Pendidikan Anak Usia Dini

		3.1.10	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		3.1.11	Program Pendidikan Menengah
		3.1.12	Program Non Formal
		3.1.14	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		3.1.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		3.1.16	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		3.1.17	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		3.1.18	Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah
		3.1.19	Program Perencanaan dan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi
3.2	Meningkatnya Status Tipe Dayah;	3.2.1	Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah
3.3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan;		
3.4	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas;	3.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		3.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		3.4.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		3.4.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		3.4.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		3.4.6	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

		3.4.7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		3.4.8	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
		3.4.9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		3.4.10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		3.4.11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
		3.4.12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru
		3.4.13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		3.4.14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
		3.4.15	Program Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan
		3.4.16	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Paramedis serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah
		3.4.17	Program Keluarga Berencana
		3.4.18	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
		3.4.19	Program Pelayanan Kontrasepsi
3.5	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;	3.4.20	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
		3.5.1	Program Pengawasan Obat dan Makanan
		3.5.2	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		3.5.3	Program Pengembangan

			Lingkungan Sehat
		3.5.4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		3.5.5	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
3.6	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Karena Penyakit PD3I.	3.6.1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		3.6.2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita
		3.6.3	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

Tujuan 4		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Sasaran		Program	
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		4.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		4.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		4.1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		4.1.6	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
		4.1.7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		4.1.8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		4.1.9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		4.1.10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

		4.1.11	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
		4.1.12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		4.1.13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		4.1.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		4.1.15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		4.1.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		4.1.17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		4.1.18	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
		4.1.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		4.1.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		4.1.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		4.1.22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		4.1.23	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		4.1.24	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		4.1.25	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
		4.1.26	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		4.1.27	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		4.1.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	4.1.29	Program Peningkatan Displin Aparatur
	4.1.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
	4.1.31	Program Penyusunan Perencanaan Satua Kerja Perangkat Kerja
	4.1.32	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.33	Program Pelayanan Administrasi Perkanoran
	4.1.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.35	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.36	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.37	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capien Kinerja dan Keuangan
	4.1.38	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.39	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.50	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.51	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.53	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.54	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.55	Program Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Aparatur
	4.1.56	Program Peningkatan dan Pembangunan Pembangunan
	4.1.57	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	4.1.58	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	4.1.59	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.60	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.61	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	4.1.62	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.63	Program Kerjasama Pembangunan
	4.1.64	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	4.1.65	Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar
	4.1.66	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.1.67	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.1.68	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	4.1.69	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
	4.1.70	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
	4.1.71	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan
	4.1.72	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
	4.1.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.74	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.75	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.76	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

	4.1.77	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	4.1.78	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.79	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	4.1.80	Program Peningkatan SDM Kearsipan
	4.1.81	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.82	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.83	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.84	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.85	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.86	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.87	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	4.1.88	Program Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan
	4.1.89	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	4.1.90	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.91	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.92	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.93	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	4.1.94	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

	4.1.95	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.96	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.97	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.98	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.99	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.100	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.101	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.102	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.103	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	4.1.104	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.105	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.106	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.107	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.108	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.109	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.110	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	4.1.111	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
	4.1.112	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
	4.1.113	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

	4.1.114	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
	4.1.115	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.116	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.117	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.118	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.119	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.120	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.121	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	4.1.122	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.123	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.124	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.125	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.126	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	4.1.127	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.128	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.129	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.130	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
	4.1.131	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

	4.1.132	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.133	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.134	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.135	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	4.1.136	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah
	4.1.137	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	4.1.138	Program Penataan Daerah Otonomi
	4.1.139	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
	4.1.140	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan
	4.1.141	Program Peningkatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Umum
	4.1.142	Program Peringatan Hari – hari Besar
	4.1.143	Program Pengembangan Komunikasi, Inforamsai dan Media Massa
	4.1.144	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
	4.1.145	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.146	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.147	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.148	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.149	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

	4.1.150	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.151	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	4.1.152	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.153	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.154	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.156	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.157	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.158	Program Pembinaan Aparatur dan Peningkatan Desa/Kelurahan/Kecamatan
	4.1.159	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan pembinaan Masyarakat Pemerintah Desa
	4.1.161	Program pelayanan Administrasi Perkantoran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.162	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
	4.1.163	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.164	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.165	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.166	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan
	4.1.167	Program Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa

	4.1.168	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.169	Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.170	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.171	Program Penyusunan Perencanaan Satuan kerja Perangkat kerja
	4.1.172	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.173	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.174	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan
	4.1.175	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa
	4.1.176	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.177	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.178	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.179	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.180	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.181	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan
	4.1.182	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa
	4.1.183	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa

	4.1.184	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.185	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.186	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.187	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.189	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.190	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.191	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.192	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.193	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.194	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.195	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.195	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.196	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	4.1.197	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.198	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.199	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.200	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.201	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.202	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

	4.1.203	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	4.1.204	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
	4.1.205	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.206	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.207	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.208	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.209	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	4.1.210	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.211	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.212	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah
	4.1.213	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
	4.1.214	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.1.215	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.1.216	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
	4.1.217	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
	4.1.218	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

	4.1.219	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.210	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.211	Program Peningkatan disiplin Aparatur
	4.1.212	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.213	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.214	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.215	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	4.1.216	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.217	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.218	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.219	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
	4.1.220	Program Penyusunan Perencanaan Satuan kerja Perangkat Kerja
	4.1.221	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
	4.1.222	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	4.1.223	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	4.1.224	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	4.1.225	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
	4.1.226	Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pembangunan
	4.1.227	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		4.1.228	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
		4.1.229	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		4.1.230	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
		4.1.231	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		4.1.232	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		4.1.233	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
		4.1.234	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		4.1.235	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		4.1.236	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
		4.1.237	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
		4.1.238	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		4.1.239	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		4.1.240	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		4.1.241	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
		4.1.242	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
4.2	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik;	4.2.1	Program Pengelolaan Data dan Informasi
		4.2.2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		4.2.3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

	4.2.4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
	4.2.5	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
	4.2.6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	4.2.7	Program Pengembangan Data/Informasi

Tujuan 5		Meningkatnya Prasarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	
Sasaran			
5.1	Meningkatnya Pemenuhan Insfrastuktur Dasar Masyarakat;	5.1.1	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi , Danau dan Sumberdaya Air lainnya
		5.1.2	Program Pengembang Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		5.1.3	Program Pengendalian Banjir
		5.1.4	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
		5.1.5	Program Pengembanagn Perumahan
		5.1.6	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		5.1.7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
		5.1.8	Program PengembanganKinerja Pengelolaan Persampahan
5.2	Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan;	5.2.1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		5.2.2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
		5.2.3	Program Pembangunan Turap/Talup/Brojong
		5.2.4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5.3	Terwujudnya Sistem Transformasi yang Aman dan Handal;	5.3.1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		5.3.2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		5.3.3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		5.3.4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		5.3.7	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
		5.3.6	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transfortasi

Tujuan 6		Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	
Sasaran			
6.1	Terselenggaranya Penataan Ruang Daerah;	6.1.1	Program Penataan Tata Ruang
		6.1.2	Program Pemanfaatan Ruang
		6.1.3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		6.1.4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		6.1.5	Program Peningkatan Keindahan dan Kecerahan
6.2	Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota;	6.2.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		6.2.2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
		6.2.3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
		6.2.4	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana
		6.2.5	Program Normalisasi Jaringan Air

Tujuan 7		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan	
Sasaran			
7.1	Meningkatnya Pemahaman terhadap Syari't Islam;	7.1.1	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
		7.1.2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		7.1.3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		7.1.4	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
7.2	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Waawasan Kebangsaan;	7.2.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		7.2.2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		7.2.3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		7.2.4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		7.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		7.2.6	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
		7.2.7	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu
		7.2.8	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 merupakan penjabaran dari target dari setiap sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis tersebut di atas, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 157 program dan 11 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 487 Tahun 2018. Uraian lebih rinci mengenai indikator kinerja utama dan target dari setiap sasaran yang ada dapat dilihat pada lampiran II Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe, sementara untuk rencana kinerja tahun 2018 seperti yang terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN HASIL	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Syari'at Islam;	• Jumlah Penerimaan Zakata, Infak, Sadaqah	Rp (Milyar)	8,88
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan;	• Penduduk dibawah garis Kemiskinan	Persen	9,50
		• Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,40

Pemerintah Kota Lhokseumawe

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018

		• Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp (Juta)	1,04
		• Persentase Pemberayaan Kelompok Perempuan	Persen	20
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM;	• Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2134
		• Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	18,20
4.	Meningkatnya Iklim Investasi;	• Jumlah Investor	PMDN/PMA	320
		• Jumlah Nilai Investasi	Rp (Milyar)	3556
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata;	• Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,12
6.	Meningkatnya Pendidikan Dasar yang Berkualitas;	• Rerata Nilai Ujian nasional Tingkat SD/MI	Nilai	90
		• Rerata Nilai Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs	Nilai	75
		• Angka Partisipasi Kasar: SD/MI SMP/MTs	Angka	105,63
		• Angka Partisipasi Murni SD/MI SMP/MTs	Angka	101
		• Angka Partisipasi Murni SD/MI SMP/MTs	Angka	96,5
		• Angka Partisipasi Murni SD/MI SMP/MTs	Angka	81,4
		• Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	15,28
7.	Meningkatnya Generasi yang Berdaya Asing;	• Rasio Ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	51,38
		• Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah	28
8.	Meningkatnya Status Tipe Dayah;	• Jumlah Dayah dengan Tipe "A"	Dayah	15

Pemerintah Kota Lhokseumawe**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018**

9.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas;	•Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah	2
10.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;	•Cakupan Penemuan dan Penangann Penderita TBC BTA	Persen	60
		•Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	6,18
11.	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Karena Penyakit PD3I;	•Cakupan Anak Usia 0-11 Bulan mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Persen	91,5
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;	• Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	CC
		• Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi
		• Opini BPK	Opini	WDP
13.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik;	• Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ada/Tidak	Ada
14.	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat;	• Persentase Akses Jaringan Air minum Layak/ Air Bersih	Persen	4,94
		• Penanganan Kawasan Kumuh	Luas (Ha)	76,4
		• Penanganan Sampah	Persen	73,5

Pemerintah Kota Lhokseumawe

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018

		• Persentase Jalan yang Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air	Persen	7,68
15.	Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan;	• Persentase Panjang Jalan daam Kondisi Mantap	Persen	62,2
16.	Terwujudnya Sistem Transportasi yang Aman dan Handal;	• Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Persen	40,1
17.	Terselenggaranya Penataan Ruang Terbuka Hijau;	• Luasan RTH Publik 20%	Persen	27,9
18.	Terselenggranya Manajemen Sampah Kota;	• Persentase Samaph yang Tertangani	Persen	74,97
19.	Menguatnya Penegakan Syari'at Islam dalam Bermasyarakat	• Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	Kasus	69
20.	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan	• Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	0

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018, Walikota Lhokseumawe telah menetapkan 157 program yang dijanjikan akan dilaksanakan pada tahun 2018, sebagai berikut:

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- 3 Program Peningkatan disiplin Aparatur
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5 Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
- 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
- 7 Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan
- 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 9 Program Pembinaan Keagamaan dan Adat
- 10 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 11 Program Keluarga Berencana
- 12 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
- 13 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 14 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 16 Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 17 Program Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
- 18 Program Pendidikan Anak Usaha Dini
- 19 Program Pengembangan Data/Informasi
- 20 Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah
- 21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaah Persampahan
- 22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 23 Program Pengembangan Nilai Budaya
- 24 Program Pengembangan Pemasaran Parawisata
- 25 Program Pengembangan Perumahan
- 26 Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah
- 27 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 28 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 29 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 30 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 31 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 33 Program Peningkatan Pelayanan Keidupan Beragama
- 34 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 35 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
- 36 Program kerja Sama Pembangunan
- 37 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 38 Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 39 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 40 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 41 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
- 42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 43 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal
- 44 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 45 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 46 Program Pengembangan Industri Kecil dan Mengengah
- 47 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 48 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuteraan Gender dan Anak
- 49 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Rehabilitasi Investasi
- 50 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 51 Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama

- 52 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 53 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
- 54 Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 55 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 56 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 57 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 58 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 59 Program Pelayanan Kontrasepsi
- 60 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- 61 Program Pendidikan Menengah
- 62 Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 63 Program Pegelolaan Kekayaan Budaya
- 64 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 65 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 66 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dan Pendayagunaan Sumberdaya laut
- 67 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 68 Program Peningkatan Parsitipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 69 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 70 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 71 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 72 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
- 73 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 74 Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
- 75 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 76 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 77 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
- 78 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam Pembangunan

- 79 Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 80 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh
- 81 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- 82 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 83 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- 84 Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
- 85 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- 86 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 87 Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
- 88 Program Peningkatan Kegiatan Budaya kelautan dan wawan maritim kepada masyarakat
- 89 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaaan
- 90 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 91 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 92 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- 93 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 94 Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah
- 95 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 96 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 97 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 98 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapida, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya
- 99 Program Pengelolaa Data dan Informasi
- 100 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 101 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 102 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 103 Progam Perbaikan Gizi Masyarakat
- 104 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
- 105 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 106 Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah

- 107 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 108 Program Pengembembangan Lingkungan Sehat
- 109 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 110 Program Sarana Penunjang Transportasi
- 111 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 112 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 113 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 114 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 115 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 116 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 117 Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan
- 118 Program Perncanaan dan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi
- 119 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 120 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
- 121 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 122 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 123 Program Perncanaan Sosial dan Budaya
- 124 Program Standararisasi Pelayanan Kesehatan
- 125 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 126 Progam Peningkatan Mutu Industri
- 127 Program Peningkatan Produksi Perternakan
- 128 Program Perencanaan Prasarana Wilyah dan Sumber Daya Alam
- 129 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 130 Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum
- 131 Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan
- 132 Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan
- 133 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 134 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- 135 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- 136 Program Peningkatan Keindahan dan Keresasian Kota
- 137 Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
- 138 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- 139 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Minum dan Air Limbah
- 140 Program Kemitraaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 141 Program pengendalian Banjir
- 142 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa
- 143 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 144 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
- 145 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
- 146 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan
- 147 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 148 Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh Kesra
- 149 Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama
- 150 Program Penelitian dan Pengembangan Agama
- 151 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 152 Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum
- 153 Program Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan
- 154 Program Peringatan Hari - Hari Besar
- 155 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 156 Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama
- 157 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mall

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, Dana yang dialokasikan Pemerintah pada APBK-P Tahun 2018 sebesar **Rp. 359.706.456.580 (Belanja Langsung).**

Dari 157 program kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, terdapat 11 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1 Penduduk di bawah garis Kemiskinan
- 2 Pertumbuhan UMKM
- 3 Jumlah Investor
- 4 Angka Harapan Lama Sekolah
- 5 Angka Usia Harapan Hidup
- 6 Kategori Hasil evaluasi SAKIP
- 7 Kategori Hasil Evaluasi LPPD
- 8 Opini BPK
- 9 Penanganan Kawasan Kumuh
- 10 Persentase sampah yang tertangani
- 11 Kasus Pelanggaran Syariat Islam

Uraian lebih rinci mengenai realisasi dan target dari setiap indikator sasaran yang ada dapat dilihat dalam *Lampiran III Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018*.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat capaian atas realisasi indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan capaian realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga menghasilkan persentase hasil kerja atas indikator kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan). Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe diperoleh berdasarkan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi atas indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (Performance Gap) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan

yang terjadi akan ditetapkan Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (Performance Improvement).

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (lampiran Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Pengukuran kinerja pada pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan kedua rumus diatas dikarenakan ada beberapa target yang pada kenyataannya lebih sedikit dari realisasi sehingga memunculkan capaian kinerja yang positif dan yang negatif.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja utama ditetapkanlah kategori pencapaian kinerja ke dalam 4 (empat) kategori seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
KATEGORI PENCAPAIAN KINERJA

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3
I	> 85%	Sangat Baik
II	70% - 85%	Baik
III	55% - 69%	Cukup
IV	< 55%	Kurang

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan atas indikator kinerja sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD sebagai dokumen utama atas penyelenggaraan SAKIP.

Dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja untuk 11 (sebelas) sasaran yang telah diperjanjikan, sebanyak 12 indikator mencapai nilai > 85% dengan kategori "sangat baik", dan sebanyak 1 indikator yang mencapai nilai < 55% dengan kategori "kurang"

Uraian target dan realisasi dari indikator kinerja setiap sasaran dapat dilihat secara rinci pada tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2018 berikut:

Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN HASIL	TARGET	REALISASI	PERSENTA SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menurunnya Angka Kemiskinan.	1.1 Penduduk di bawah garis Kemiskina n	Persen	9,50	11,81	76%

2	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM.	2.1	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2134	2840	133%
3	Meningkatnya Iklim Investasi.	3.1	Jumlah investor	PMDN/PMA	320	388	121%
4	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	4.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	15,28	15,17	99%
5	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas.	5.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,05	71,14	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	6.1	Kategori Hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	CC	100%
		6.2	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	100%
		6.3	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	100%
7	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.	7.1	Penanganan Kawasan Kumuh	Persen	76,4	66,7	87%
8	Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan.	8.1	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	62,2	26,23	42%
9	Terselenggaranya Penataan Ruang Terbuka Hijau.	9.1	Luasan RTH Publik 20%	Persen	27,9	30,9	111%
10	Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota.	10.1	Persentase sampah yang tertangani	Persen	74,97	81,53	91%

11	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat.	11.1 Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	69	47	116%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja						98%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja tersebut maka diperoleh nilai **rata-rata persentase tingkat capaian indikator kinerja utama** Tahun 2018 yaitu sebesar **99%** dengan kategori capaian **“sangat baik”**.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018, jumlah sasaran yang ditetapkan adalah 11 (sebelas) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama. Adapun analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikatornya akan dijabarkan sebagai berikut

SASARAN 1:

“Menurunnya Angka Kemiskinan”

Upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menurunkan Angka Kemiskinan menjadi perhatian serius yang perlu segera dituntaskan. Pemenuhan sasaran ini didukung dengan indikator kinerja utama yaitu “penduduk di bawah garis kemiskinan”.

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang digunakan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga, yang dimaksud penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 yakni 11,81 persen atau 23.880 Jiwa, turun sekitar 0,51 persen dari Tahun 2017 dimana angkanya mencapai 12,32 persen atau 24.400 Jiwa Penduduk Miskin.

Tahun 2018, Angka kemiskinan Kota Lhokseumawe mengalami penurunan sebesar 0.51 %.

Meskipun Persentase Kemiskinan di Kota Lhokseumawe turun pada Tahun 2018, bahkan lebih minim dari angka Makro Propinsi Aceh 15,97 persen. Namun secara Nasional Kota lhokseumawe masih tinggi sebab Angka Kemiskinan Makro Nasional hanya 9,82 persen.

Gambar 1:

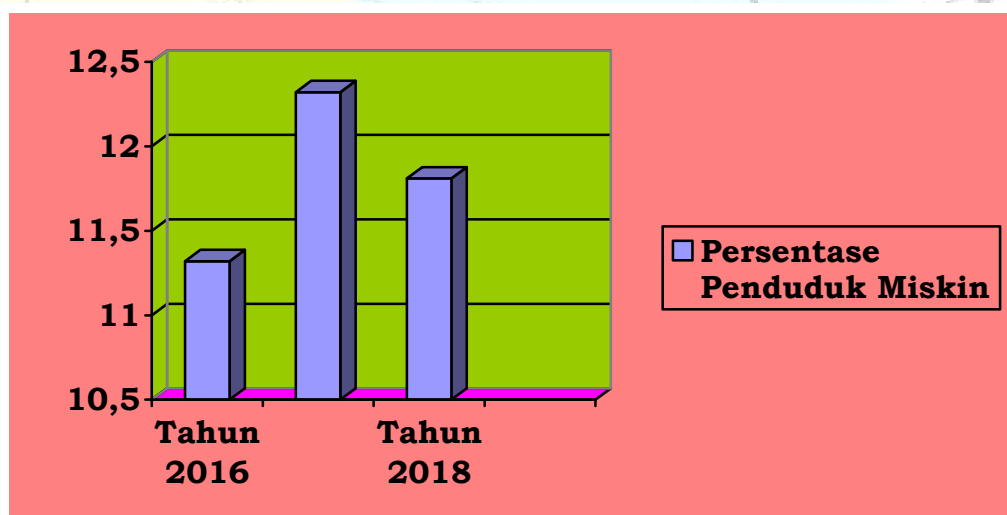
Expose Data Kemiskinan di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe



Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 9,50%, indikator ini memperoleh persentase capaian kinerja sebesar 76%. Hasil capaian indikator ini diperoleh dengan menggunakan rumusan kondisi kedua dimana “semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe masih harus berupaya keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Realisasi indikator kinerja sebesar 11,81% mengindikasikan masih tingginya angka penduduk miskin di wilayah Pemerintah kota Lhokseumawe.

Untuk dapat mencapai target seperti yang diharapkan, Pemerintah mengajak semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menciptakan program kerja yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan berharap agar masyarakat dapat lebih kreatif dan memanfaatkan lahan kosong agar bisa menghasilkan, yang nantinya hasil tersebut dapat membantu mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

Diagram 1:
Persentase Penduduk Miskin dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
Tahun 2016-2018



SASARAN 2:

“Meningkatnya Pertumbuhan UMKM”

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah pertumbuhan UMKM.

**Pertumbuhan
UMKM meningkat
pesat dan melebihi
target rencana,
sehingga capaian
kinerja indikator ini
adalah sebesar
113%**

Pesatnya pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe terlihat dari jumlah UMKM sampai dengan Tahun 2018 berjumlah 2.840 unit usaha. Jika dibandingkan dengan target sebesar 2.134 unit usaha, pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe melebihi target yang diharapkan sehingga capaian kinerjanya adalah 113%.

Pertumbuhan UMKM ini dapat terus berkembang bila ada konsistensi pendampingan dari pihak pemerintah. Namun salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama melalui pertumbuhan UKM tentunya secara general akan membutuhkan biaya-biaya untuk pembinaan dan lainnya. Pesatnya pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe terlihat dari jumlah UMKM sampai dengan Tahun 2018 berjumlah 2.840 unit usaha. Jika dibandingkan dengan target sebesar 2.134 unit usaha, pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe melebihi target yang diharapkan sehingga capaian kinerjanya adalah 113%.

Untuk memajukan UMKM di daerah, Pemerintah akan mendorong pihak perbankan agar mau memberikan keringanan dan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM. Begitu juga dengan persoalan regulasi usaha, sedapat mungkin pemerintah daerah memudahkan proses perizinan agar berbagai usaha kecil dan menengah di daerah dapat lebih berkembang.



Gambar 2: FGD Program LED dan UMKM Unggulan bersama pihak Perbankan

Salah satu upaya untuk menghidupkan dan mengarahkan iklim usaha industri kreatif dan UMKM di daerah adalah dengan mengajak pihak ritel agar menampung produk lokal. Dengan ditampungnya produk pengrajin di daerah, baik hasil produksi kerajinan tangan, kuliner dan berbagai aneka produk lainnya, maka akan memberi dampak positif terhadap perkembangan usaha kecil menengah di Kota Lhokseumawe.

Di antaranya, adalah terbukanya peluang dan akses pasar bagi produk kerajinan masyarakat dan juga sebagai salah satu usaha promosi sehingga lebih dikenal dan menjadi daya tarik bagi industri kecil di daerah.

Oleh karena pentingnya langkah-langkah memajukan usaha kecil dan menengah di daerah agar perekonomian dapat tumbuh dengan baik, maka pihak Pemerintah mengimbau pengusaha minimarket ataupun supermarket yang ada di Kota Lhokseumawe, untuk mau menampung hasil produksi kerajinan lokal yang diproduksi oleh pengrajin-pengrajin di Lhokseumawe agar Usaha Kecil tersebut dapat berkembang.

SASARAN 3:

“Meningkatnya Iklim Investasi”

Iklim investasi harus ditingkatkan untuk menunjang perekonomian daerah menjadi lebih baik ke depan. Peningkatan iklim investasi adalah untuk optimalisasi upaya peningkatan perekonomian daerah terutama di bidang investasi dan pelayanan perijinan.

Gambar 3:

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional dan Investasi dengan PT.PATNA di KEK Arun Lhokseumawe



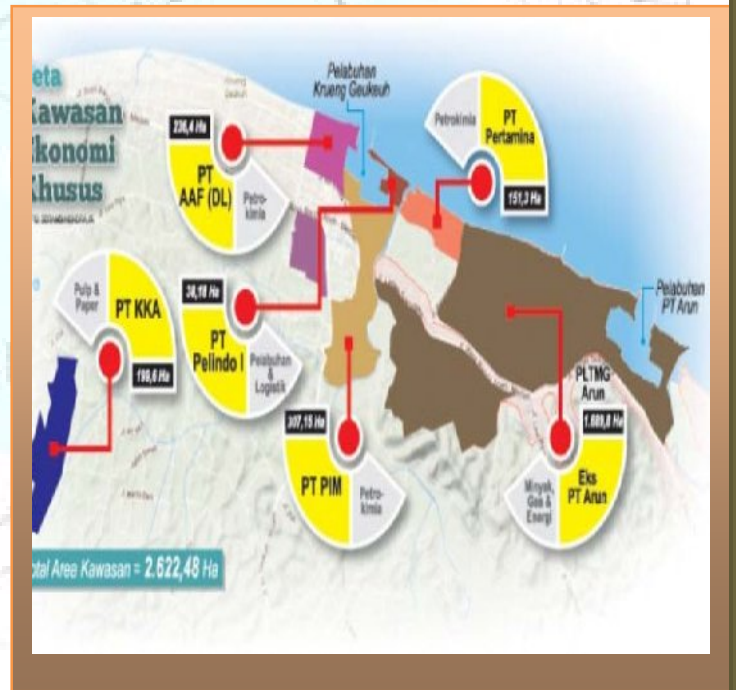
Dengan ditetapkannya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Arun Lhokseumawe, banyak calon investor yang datang untuk melihat langsung potensi usaha yang tersedia.

Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, yang merupakan PSN (Proyek Strategis Nasional) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

KEK Arun Lhokseumawe berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri.

Peningkatan minat investasi ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Aceh sudah semakin membaik dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Aceh ke depan yang kian meningkat. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe diproyeksikan akan mencapai nilai investasi sebesar USD 3,8 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang pada tahun 2021.

Untuk Tahun 2018, dari target jumlah investor sebanyak 320 PMDN, terealisasi sebanyak 388 PMDN yang terdata sesuai dengan data dari Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 121% melebihi target yang ditetapkan.



Gambar 4:
Profil KEK Arun Lhokseumawe

SASARAN 4:

“Meningkatnya Pendidikan Dasar Yang Berkualitas”

Pendidikan yang berkualitas adalah upaya untuk melahirkan manusia yang cerdas dan berakhlak serta mampu bersaing. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya

pribadi manusia menurut ukuran normatif. Sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran pendidikan penting juga dalam membangun peradaban bangsa yang berdasarkan atas jati diri dan karakter bangsa.



Gambar 5:
Walikota Lhokseumawe tinjau UNBK
Tingkat SMP Tahun 2018

Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Pemilihan indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 berkisar pada angka 15,17 tahun.

Artinya adalah secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,17 tahun atau setara dengan lulus mengenyam pendidikan Diploma III.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 99% dengan target rencana sebesar 15,28 tahun. Dengan demikian, target Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tercapai.

Masyarakat memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi yang artinya semakin berkompeten untuk memperoleh pekerjaan

nantinya. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.

SASARAN 5:

“Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas”

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, fokus Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu melalui peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit tipe D sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta tenaga kesehatan yang handal dan berkompeten sehingga dapat mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Terwujudnya sasaran ini didukung oleh indikator kinerja yaitu Angka Usia Harapan Hidup. Indikator ini menjadi tolak ukur atas derajat kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe dalam menghadapi kondisi lingkungan di era modern seperti saat ini yang terus turun disebabkan pola hidup yang tidak sehat.

Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018 adalah 71,14 tahun yang berarti rata-rata usia hidup masyarakat adalah berumur 71 tahun. Untuk skala nasional, Usia Harapan Hidup masyarakat Indonesia adalah 75-77,5 tahun. Artinya bahwa di Kota Lhokseumawe angka tersebut masih dalam rata-rata usia hidup masyarakat Indonesia berkisar 70 tahun.

Jika dibandingkan Tahun 2017, pada tahun ini usia harapan hidup masyarakat Kota Lhokseumawe tidak mengalami peningkatan pesat. Dari 71,05 tahun, menjadi 71, 14 tahun dengan capaian kinerja 100%. Peningkatan usia harapan hidup ini disebabkan oleh keberhasilan dalam menangani kasus penyakit menular, penyakit terkait kehamilan,

penyakit-penyakit terkait gizi yang banyak menyebabkan kematian dan disabilitas.

SASARAN 6:

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

Melalui implementasi SAKIP, paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan, tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien. Anggaran juga dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas.

Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan karena tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi implementasi SAKIP bukanlah penilaian terhadap laporan kinerja, melainkan evaluasi terhadap seluruh sistem dalam manajemen kinerja. Evaluasi itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memiliki kemampuan pengelolaan anggaran sesuai dengan sasaran yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ada 3 (tiga) indikator kinerja utama yang diperjanjikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut:

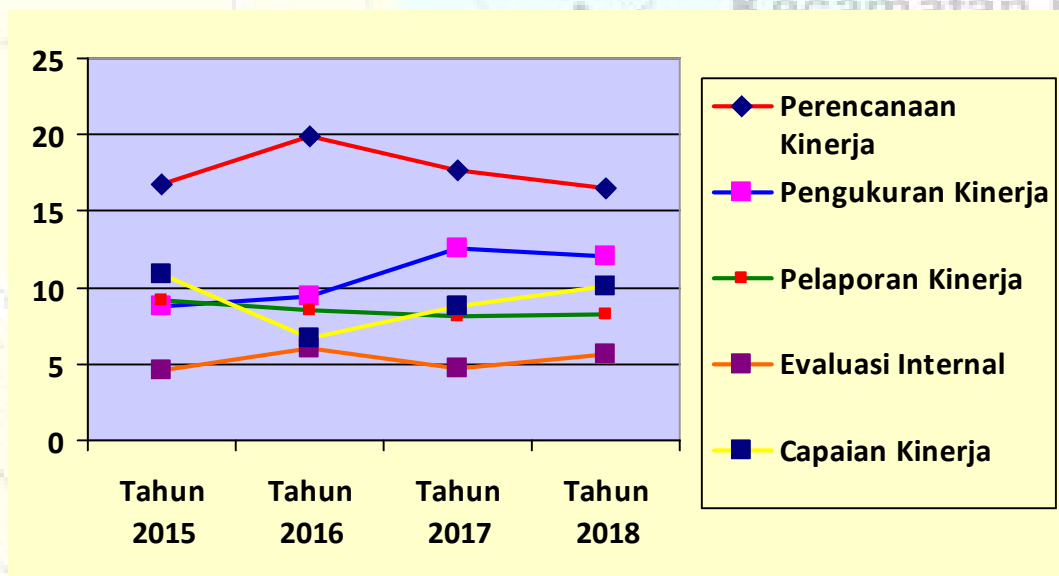
6.1 Kategori Hasil Evaluasi SAKIP

Setiap instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. SAKIP menguji akuntabilitas seluruh proses yang

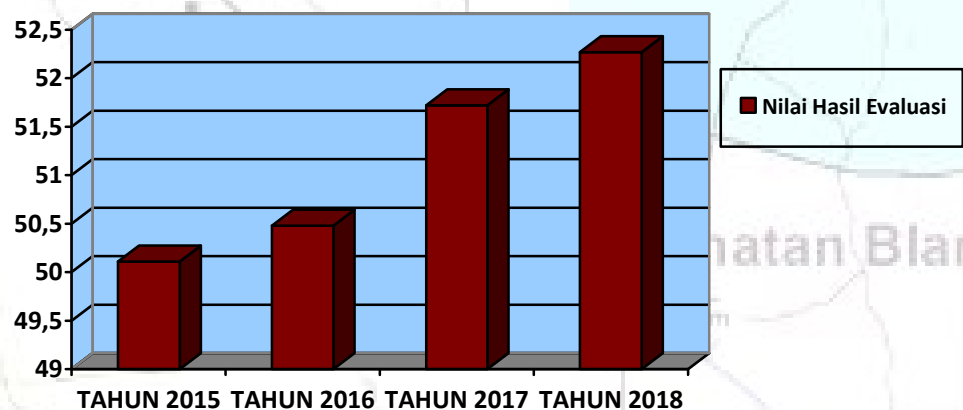
berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Evaluasi SAKIP dilakukan setiap tahun dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja pelayanan publik. Sejak Tahun 2015, hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Lhokseumawe belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan masih berada pada kategori CC hingga Tahun 2017.

Diagram 2:
Hasil Evaluasi SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2018



Perbandingan nilai hasil evaluasi SAKIP Kota Lhokseumawe oleh KEMENPAN & RB Tahun 2015 – 2018



	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2015	2016
a.	Perencanaan Kinerja	30	16,75	19,87
b.	Pengukuran Kinerja	25	8,80	9,45
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,20	8,52
d.	Evaluasi Internal	10	4,56	5,96
e.	Capaian Kinerja	20	10,80	6,68
	Nilai Hasil Evaluasi	100	50,11	50,48
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2016	2017
a.	Perencanaan Kinerja	30	19.87	17.69
b.	Pengukuran Kinerja	25	9.45	12.55
c.	Pelaporan Kinerja	15	8.52	8.06
d.	Evaluasi Internal	10	5.96	4.66
e.	Capaian Kinerja	20	6.68	8.77
	Nilai Hasil Evaluasi	100	50.48	51.72
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2017	2018
			Nilai	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,69	16,54
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,55	12,08
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,06	8,21
d.	Evaluasi Internal	10	4,66	5,67
e.	Capaian Kinerja	20	8,77	10,06
	Nilai Hasil Evaluasi	100	51,73	52,57
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan belum ada perbaikan serius atas hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Kemenpan & RB, serta menjadi PR utama yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe agar bisa mendongkrak nilai dan kategori SAKIP menjadi B.

6.2 Kategori Hasil Evaluasi LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan wujud pencapaian kebijakan, akuntabilitas dan transparansi, sekaligus alat ukur keberhasilan Pemerintah Daerah. LPPD menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai LPPD Kota Lhokseumawe Tahun 2018 adalah 2,73 dengan kategori Tinggi atau Baik dan mendapat peringkat ke 15 di tingkat Propinsi Aceh. Sementara pada Tahun 2017 adalah 2,76 dengan kategori Tinggi atau Baik dan berada di peringkat 16 di tingkat Propinsi Aceh. Untuk meningkatkan nilai LPPD diperlukan upaya antara lain mendorong OPD untuk memenuhi Indikator Kinerja Kunci dengan akurat dan tepat.

6.3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah;

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 kembali memperoleh WTP setelah sempat turun di Tahun 2016 menjadi WDP.

Perolehan opini WTP ini diraih dengan usaha keras Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerahnya.

Gambar 6:
Penyerahan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017



Opini WTP ini merupakan keenam kali yang diterima oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan merupakan kebanggaan bersama seluruh lapisan masyarakat Kota Lhokseumawe. Karena dengan meraih WTP telah menunjukkan bahwa pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan dan tepat waktu penyampaiannya.

SASARAN 7:

“Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat”

Salah satu upaya untuk mengatasi wilayah kumuh yaitu melalui pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Upaya percepatan penanganan kumuh Kota Lhokseumawe harus disikapi dengan peningkatan kualitas permukiman, yang bertujuan mencegah timbulnya daerah kumuh baru, agar masyarakat dapat mengakses infrastruktur

dan pelayanan dasar. Sehingga penanganan kawasan kumuh menjadi indikator kinerja atas sasaran ini.

Program Kotaku dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Program ini terus diupayakan setiap tahun agar tercapainya sasaran Kota Tanpa Kumuh di Tahun 2019 mendatang. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 87% dimana target yang ditetapkan adalah 76,4% dan terealisasi sebesar 66,7%.

Total kumuh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 adalah seluas 10,87 Ha. Program Kotaku membangun infrastruktur berupa pembangunan dan rehab jalan sepanjang 5929,5 M, pembangunan dan rehab drainase sepanjang 10.854,3 M, dan pembangunan jamban sejumlah 21 unit.



Selanjutnya, pengadaan becak sampah sejumlah 36 unit, pembangunan bak sampah sejumlah 10 unit dan pembangunan sumur bor serta tower penampung sejumlah 47 titik di 15 Gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Sehingga, pada tahun 2019, total kumuh Kota Lhokseumawe tersisa 8,99 Ha.

SASARAN 8:

“Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan”

Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup masyarakat.

Untuk sasaran ini, indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh panjang jalan di Kota Lhokseumawe sepanjang 412.468 km, kondisi panjang jalan Tahun 2018 dalam kondisi mantap adalah 108.197 km. Sehingga realisasi indikator ini adalah 26,23%. Sementara untuk capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 42% dari target yang ditetapkan sebesar 62,2%.



Gambar 7:
Kondisi jalan lingkar Kota Lhokseumawe yang perlu penghijauan

SASARAN 9:

“Terselenggaranya Penataan Ruang Terbuka Hijau”

Pembangunan fisik tak jarang menimbulkan banyak masalah seperti kepadatan bangunan, kepadatan guna lahan bahkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus untuk pengembangan kualitas lingkungan melalui pengembangan kota hijau dengan berfokus kepada peningkatan kualitas lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), dan diterapkannya unsur infrastruktur hijau sebagai unsur utama kota hijau.

Luas ruang Terbuka Hijau Kota Lhokseumawe saat ini mencapai angka 30,9% melebihi target yang ingin dicapai sebesar 27,9%. Dari 181,06 km² luas wilayah Kota Lhokseumawe, sebesar 20% atau 36,212 km² diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sektor publik.

Realisasi yang dicapai adalah seluas 11,200 km². Hal ini berarti Kota Lhokseumawe masih membutuhkan pengembangan konsep kota hijau sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

SASARAN 10:

“Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota”

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sebagian besar produksi sampah di Kota Lhokseumawe didominasi jenis organik, seperti daun pepohonan, kulit buah-buahan, sayuran busuk dan sisa-sisa kotoran ikan. Produksi sampah itu lebih didominasi dari pasar yang ada dalam wilayah Kota Lhokseumawe, bila dibandingkan dengan produksi sampah dari pemukiman warga. Untuk sampah nonorganik, seperti plastik, botol bekas minuman, dan logam

telah terlebih dahulu diambil oleh pemulung pada tempat-tempat penampungan sementara, untuk dijual.

Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, diupayakan dengan cukup serius dalam pengelolaannya.

Dari jumlah volume sampah sebesar 112.564 m³ yang berhasil tertangani adalah sebesar 91.776 m³ atau sekitar 81,53%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 99% dimana indikator ini menggunakan cara perhitungan rumus dengan kondisi dimana semakin tinggi realisasi semakin rendah capaian kinerjanya.

SASARAN 11:

“Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat”

Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat serius dalam menegakkan syariat islam yaitu melalui penegakan Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Untuk mendukung sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja utamanya yaitu penanganan kasus pelanggaran syariat islam yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.



Pada Tahun 2018, jumlah pelanggaran Qanun (Peraturan Daerah) yang berhasil ditangani dan ditertibkan sebanyak 58 kasus.

Dari target yang ditetapkan adalah 69 kasus maka capaian indikator kinerjanya adalah 116%. Besarnya capaian kinerja dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif yang semakin

tinggi realisasi berarti semakin rendah capaian kinerjanya. Dalam hal ini, realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan. Sehingga persentase capaiannya melebihi 100%.

3.3 ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 pada umumnya mendapatkan kategori yang sangat baik. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang diperjanjikan, sebanyak 12 (dua belas) indikator yang dinyatakan berhasil capaian kinerjanya yaitu diatas 85%, dan hanya 1 (satu) indikator yang mendapat kategori kurang yaitu dibawah 50%.

Berikut akan dijelaskan analisis atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja serta alternatif solusi yang dapat dilakukan di masa mendatang:

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
Penduduk di bawah garis Kemiskinan	Capaian kinerja sebesar 76% mengindikasikan hasil kinerja yang “baik” dan cukup berhasil. Indikator ini merupakan indikator negatif, dimana realisasi yang besar menunjukkan hasil kinerja yang rendah.	- melakukan revisi atas penetapan target rencana sehingga capaian kinerja dapat menjadi lebih baik; - Menetapkan program-program pemerintah terkait peningkatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup.

2.	Pertumbuhan UMKM	Meningkat pesat pada Tahun 2018 dimana realisasi melebihi target yang ditetapkan. Dari 2134 unit UMKM yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 2840. Capaian kinerja ini adalah 133%.	- Melakukan asistensi terhadap UMKM yang memiliki prospek untuk berkembang; - Mendorong pihak Perbankan untuk memberikan keringanan dan kemudahan pinjaman bagi UMKM; - Menyusun regulasi yang memudahkan UMKM dalam proses perizinan dan pengembangan usaha.
3.	Jumlah Investor	Melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 121% dan dikatakan sangat berhasil. Dari 320 jumlah PMDN yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 388 PMDN yang terdata.	- Penguatan UMKM melalui program-program pemerintah - Asistensi terhadap UMKM yang memiliki prospek untuk dikembangkan
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	Capaian kinerja indikator ini adalah 99% dan termasuk kategori sangat berhasil.	- Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
5.	Angka Usia Harapan Hidup	Capaian kinerja indikator ini adalah 100% dan termasuk kategori sangat berhasil.	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pola hidup sehat - Memberantas penyakit menular,

			penyakit yang terkait dengan gizi, dan penyakit terkait kehamilan yang dapat menyebabkan tingginya angka kematian
6.	Kategori Hasil evaluasi SAKIP	Sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu kategori CC.	- Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN&RB; - Membentuk tim evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah.
7.	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu kategori Tinggi.	- Melengkapi data pendukung capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Opini BPK	Sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	- Melakukan proses administrasi dengan lebih ketat melalui pencatatan setiap bentuk berkas maupun fisik, menyempurnakan

			regulasi tentang teknis penatausahaan keuangan, - peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan, - Pengembangan aplikasi pendukung laporan keuangan.
9.	Penurunan persentase kawasan pemukiman kumuh;	Luas pemukiman kumuh yang berhasil ditangani seluas 44,2 hektar dari jumlah total wilayah kumuh Kota Lhokseumawe dengan luas sebesar 120,87 hektar.	- Pembangunan infrastruktur wilayah Kumuh pesisir pantai menjadi lokasi wisata - Penyerahan bantuan BDI (Bantuan Dana Investasi) dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
10.	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Indikator ini termasuk kinerja yang tidak memenuhi target atau gagal. Dari 412.468 km total panjang jalan Kota Lhokseumawe yang berkondisi baik hanya sepanjang 108.197 km atau sekitar 26,23%.	- Rehabilitasi jalan utama yang umumnya rusak karena tergenang air, - Pembangunan jalan lingkar Kota Lhokseumawe
11.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Capaian kinerja sebesar 111%. Sebesar 20% atau seluas 362.120 m ² adalah luas RTH sektor publik Kota Lhokseumawe, realisasinya adalah seluas 112.000 m ² atau sebesar 30,9%.	Revitalisasi Taman Riyadhah yang terdapat di pusat Kota Lhokseumawe.

12	Persentase penanganan sampah;	Penanganan sampah sebanyak 91.776 m ³ dari total jumlah sampah sebanyak 112.564 m ³ atau sekitar 81,53%. Capaian kinerjanya adalah 91% dengan kategori sangat baik.	Tersedianya TPA seluas 12 hektar yang diperkirakan dapat menampung sampah sampai 15 tahun ke depan.
13	Kasus pelanggaran syariat islam	Dari 69 kasus yang ditargetkan untuk ditangani, terealisasi sebanyak 58 kasus dengan capaian kinerja sebesar 116%	Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, meningkatkan jadwal operasi penertiban dan penegakan Perda (Qanun) sehingga pada tahun mendatang jumlah kasus dapat kembali diturunkan secara signifikan.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	192.065.865.971	179.492.377.217	93,45%
2	Dinas Kesehatan	104.304.359.119	82.013.424.703	78,63%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	137.248.808.815	134.698.350.341	98,14%
4	Badan Kesbangpol	2.960.161.641	2.819.102.500	95,23%
5	Satpol PP dan WH	10.004.231.260	9.253.089.625	92,49%
6	Dinas Sosial	8.374.440.744	7.205.450.626	86,04%
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.968.312.888	5.746.475.014	96,28%

8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.787.379.525	4.893.663.432	84,56%
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	12.995.291.211	11.402.242.933	87,74%
10	Dinas Lingkungan Hidup	30.338.125.230	29.938.553.709	98,68%
11	Dinas Kependudukan Dan Cakil	4.046.209.500	3.677.569.960	90,89%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	3.851.943.147	3.353.132.727	87,05%
13	Dinas Perhubungan	5.640.095.400	4.854.625.692	86,07%
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	2.395.430.380	2.239.099.981	93,47%
15	Sekretariat Daerah	47.748.864.154	42.401.591.725	88,80%
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.455.584.877	8.891.224.568	77,61%
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	5.439.991.820	5.225.363.007	96,05%
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)	1.487.849.000	1.233.084.873	82,88%
19	Dinas Perpustakaan dan Kersipan	1.928.862.630	1.694.217.748	87,84%
20	Dewan Perwakilan Rakyat Kota	8.878.563.005	8.636.129.272	97,27%
21	KDH dan WKDH	644.070.380	554.285.184	
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	20.425.886.096	19.061.333.350	93,32%
23	Kecamatan Banda Sakti	2.880.753.800	2.424.432.859	84,16%
24	Kecamatan Blang Mangat	2.651.389.177	2.327.342.755	87,78%
25	Kecamatan Muara Satu	2.064.218.585	1.822.140.197	88,27%
26	Kecamatan Muara Dua	2.802.727.444	2.475.152.599	88,31%
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.602.751.835	12.868.720.189	94,60%

28	Inspektorat	7.681.214.289	6.771.321.296	88,15%
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.481.270.423	8.437.854.184	88,99%
30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	158.242.804.924	135.138.579.013	
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.791.550.729	7.452.418.593	76,11%
32	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah	15.864.579.052	15.260.311.061	96,19%
33	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	2.949.478.144	2.741.448.256	92,95%
34	Sekretariat Baitul Mal	7.158.375.670	6.977.526.498	97,47%
35	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	1.743.128.297	1.511.020.558	86,68%
JUMLAH		860.904.569.162	775.492.656.245	90,08%

REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
Menurunnya Angka Kemiskinan	76%	88,66%	116,66%
Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	133%	77,61%	58,35%
Meningkatnya Iklim Investasi	121%	96,28%	79,57%
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	99%	93,45%	94,39%
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	100%	78,63%	78,63%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100%	88,80%	88,80%

Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	87%	98,14%	112,80%
Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan	42%	98,14%	233,67%
Terselenggaranya Penataan Ruang Terbuka Hijau	111%	98,68%	88,90%
Terselenggaranya Manajemen Sampah Kota	91%	98,68%	108,44%
Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	116%	92,49%	79,73%
RATA-RATA REALISASI CAPAIAN	97,82%	91,78%	93,83%

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada Tahun 2018, maka realisasi anggaran sebesar 91,78% lebih kecil dari realisasi kinerja sebesar 97,82%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan efektifitas dalam pekerjaan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2018 dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu Rencana Strategis telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

Berdasarkan keseluruhan sasaran strategis yang ada, pencapaian hasil berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun 2018 rata-rata mencapai 98%.

Dari aspek keuangan pencapaian rata-rata realisasi keuangan mencapai 90,08%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sasaran tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu :

1. Dari 11 (sebelas) sasaran yang ada terdapat 1 sasaran masih dalam kategori Kurang, dan hal ini perlu dievaluasi kembali penyebab tidak tercapainya target pengukuran kinerja.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Keterbatasan anggaran yang tersedia pada APBK tahun 2018, menyebabkan adanya pengurangan/pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2018.
4. Kendala lainnya yang dihadapi yang mengakibatkan pencapaian sasaran tidak optimal antara lain masih terdapatnya beberapa jabatan struktural yang kosong di lingkungan Pemerintah Kota

Lhokseumawe yang mengakibatkan tugas-tugas tidak terlaksana secara optimal.

5. Belum diterapkannya sistem pengumpulan data yang akurat. Membuat sistem pengumpulan data yang efektif dan akurat, serta melakukan optimalisasi terhadap kinerja pegawai untuk mendukung sistem yang telah dibuat.

Semoga dengan adanya LKj IP ini dapat menjadi dorongan dan acuan bagi sempurnanya penyusunan LKj IP di masa mendatang dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.